Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa

The Role of the Police in the Application of Restorative Justice to Perpetrators of Criminal Offenses Conducted by Children and Adults

Haryanto Ginting & Muazzul

Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: Oktober 2018; Disetujui: November 2018; Diterbitkan: Januari 2019

* Email: muazzul@staff.uma.ac.id

Abstrak

Maraknya kasus tawuran antar pelajar SMU dan bahkan bukan hanya antar pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus hal ini sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan tawuran ini sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kepolisian dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa yang terjadi di Kecamatan Namo Rambe Kabupten Deli serdang. Metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat normative. Berdasarkan data yang diperoleh dalam hasil penelitian ini maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: Sistem peradilan pidana harus selalu mempermosikan kepentingan hukum dan keadilan. Tetapi terdapat pandangan salah bahwa ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan didalam masyarakat. Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam menegakkan hukum diharapkan dapat merespon hal ini dengan menerapkan mekanisme *Restorative Justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Keadilan, Tindak Pidana Pengeroyokan.

Abstract

The rise of cases of brawl between high school students and even not only between high school students, but also has hit up to campuses, this often happens in big cities such as Jakarta, Surabaya, and Medan. This study aims to determine the role of the Police in implementing *Restorative Justice* against perpetrators of criminal acts of beating carried out by children and adults that occurred in the District of Namo Rambe District of Deli Serdang. The research method is done by using descriptive qualitative method that is normative. Based on the data obtained in the results of this study, the authors draw conclusions as follows: The criminal justice system must always promote the importance of law and justice. But there is a false view that the measure of the success of law enforcement is only marked by the success of bringing a suspect to court and then being sentenced. The measure of success of law enforcement by law enforcement officers should be characterized by the achievement of values of justice in the community. The police as a state tool that plays a role in enforcing the law is expected to be able to respond to this by implementing a *Restorative Justice* mechanism.

Keywords: *Restorative Justice*, Justice, Crime Crime.

How to Cite: Haryanto Ginting & Muazzul (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2): 32-40.

PENDAHULUAN

Hukum tidak sekedar untuk mewujudkan ketertiban, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tidak dengan sendirinya akan melahirkan keadilan akan tetapi untuk tercapainya keadilan hukum harus ditegakkan. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.

Restorative justice menjadi wacana yang sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat hukum formal didominasi aliran pemikiran positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). *Restorative Justice* hadir dengan menawarkan penyelesaian tidak formalistik yang sekedar mengedepankan sisi *legalistic* formal, tetapi tidak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, *reparasi* (pelaku membetulkan kembali segala hal yang dirusak), konferensi korban-pelaku (yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tokoh pemuka dalam masyarakat), *victim awareness work* (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan dampak dari perbuatannya). Selain itu, sistem peradilan pidana yang ada sekarang dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi terhadap kepentingan umum yang semakin tidak dirasakan.

Kenyataan menunjukkan bahwa banyak banyak masyarakat lebih memilih menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya diluar sistem. Penyelesaian diluar sistem baik dilakukan oleh para pihak (Pelaku dan korban secara mandiri) ataupun dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap

Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses berjalan.

Terdapat Pandangan salah bahwa seringkali ukuran keberhasilan penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan tersangka ke pengadilan dan kemudian dijatuhi hukuman. Seharusnya ukuran keberhasilan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum ditandai dengan tercapainya nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Lembaga Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme *restorative justice* ini. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.

Dewasa ini kita kerap menyaksikan kenakalan remaja di media massa baik elektronik maupun cetak, Mulai dari dari ugal-ugalan dalam berkendara di jalan hingga perkelahian dan pengeroyokan serta pelecehan seksual. Kejahatan remaja ini sangat sering bersifat kelompok karena ada persamaan misalnya satu sekolah, satu lingkungan tempat tinggal atau satu perkumpulan mereka hingga kita melihat adanya genk motor dan lainnya, *United Nations* (UN) atau PBB menyebutnya sebagai anak muda (*Youth*) untuk usia 15-24 Tahun. Ini kemudian disatukan dalam batasan kaum muda (*Young poeple*) 10-24 Tahun. Sedangkan klasifikasi *World Health Organization* (WHO) remaja 10-19 tahun.

kelompok-kelompok remaja ini sangat mudah terpancing saat antar kelompok bertemu satu dengan yang lain maka sangat sering terjadi saling iseng, atau sedikit saja permasalahan kecil misalnya menggoda wanita yang ada dikelompok lain atau saling pamer kendaraan bermotor hingga terjadi saling ejek berlanjut dengan perkelahian dan bahkan pengerusakan terhadap harta benda yang mengakibatkan kerugian materil maupun korban manusia baik luka ringan maupun berat bahkan ada meninggal dunia.

Saat ini kejahatan pengeroyokan sering terjadi Indonesia, dengan perkembangan teknologi yang pesat sekarang ini, secara merata berdasarkan pantauan Penulis melalui berbagai media, tindak pidana pengeroyokan terjadi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dalam bentuk tawuran atau perkelahian pelajar. Perkelahian, atau yang sering disebut tawuran, sering terjadi di antara pelajar. Kondisi ini lah yang membuat pelajar Indonesia pada jaman sekarang bukannya tambah membaik atau tambah meningkatnya prestasi akademik mau pun non akademik, tetapi malah sebaliknya, tambah menurun secara terus-menerus. Ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tawuran antar pelajar SMA. Bahkan bukan “hanya” antar pelajar SMU, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus. Ada yang mengatakan bahwa berkelahi adalah hal yang wajar pada remaja.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta misalnya tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37

korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus. Ditahun 2012 saja berdasarkan data yang dihimpun dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) tercatat sebanyak 147 kasus tawuran dan sudah memakan korban jiwa sebanyak 82 anak. Ironisnya di lapangan menunjukan tawuran telah merambah pada pelajar di tingkatan SD dan SMP.

Kebanyakan penyebab tawuran itu antara lain, minimnya pendidikan karakter di kurikulum, pengaruh tayangan kekerasan dan terbatasnya ruang ekspresi positif untuk siswa. Selain faktor tersebut, terdapat pemicu yang bisa dikatakan paling konkret yang terjadi di lapangan. Antara lain, adanya keinginan meningkatkan pamor sekolah dengan menyerang sekolah lain, pertandingan antar sekolah yang memicu keributan, tradisi senior kepada juniornya, lemahnya antisipasi aparat hukum dan kurangnya perhatian orang tua dan pihak sekolah pada anak.

Oleh sebab itu harus ada penanganan yang tegas dari pihak berwenang, sekolah serta tak lupa peran penting dari keluarga untuk menjauhkan kasus tawuran dari para pelajar Indonesia. Apabila itu semua tidak dapat terjadi, kondisi itu dipastikan tidak akan berakhir dan korban pun akan kembali berjatuh.

Dengan menjadikan *Restorative Justice* sebagai pendekatan maka ada beberapa keuntungan yang bisa didapat. Pertama, masyarakat diberi ruang untuk mengatasi sendiri permasalahan hukumnya yang dirasakan lebih adil. Kedua, beban negara dalam beberapa hal menjadi berkurang. Untuk mengurus tindak pidana-tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat dan aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dapat memfokuskan diri untuk untuk

memeberantas tindak pidana-tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

“Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”.

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi “penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah”.

Salah satunya adalah melalui kegiatan ilmiah, seperti penelitian dimana dalam penelitian tersebut akan mencari data atau bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah merupakan gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti”.

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data mengenai perkara pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan. yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Polsek

Namo Rambe yaitu lokasi penelitian dilakukan.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis

Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari: 1) Buku-buku literature; 2) Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung; 3) Makalah-makalah/laporan penelitian; 4) Artikel-artikel, media massa dan internet.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Adapun tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana; 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan

kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Polsek Namo Rambe dengan mengambil kasus pengeroyokan yang oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan.

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (contents analysis) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penerapan *Restorative justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pengeroyokan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pengeroyokan. Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pengeroyokan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pengeroyokan tersebut, dengan cara melakukan tindakan Petama ditempat kejadian perkara, mengambil sidik jari dan identitas lainnya, mencari keterangan dan barang bukti. (Hanafiah, 2000).

Selanjutnya setelah mengumpulkan bukti-bukti yang ada dan juga saksi-saksi maka pihak penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelakunya dan memproses ke pengadilan agar pelakunya dapat dihukum sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hal ini Proses Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa secara bersamaan, dimana Kepolisian setelah mendapat Laporan dari masyarakat langsung menuju tempat kejadian perkara melakukan tindakan pertama berupa mengamankan korban, mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan dan mencari saksi-saksi setelah itu membawa korban Puskesmas untuk berobat selanjutnya dibawa ke Polsek Namo Rambe untuk membuat Laporan Polisi dan melakukan Pemeriksaan terhadap Korban dan saksi-saksi serta menyita barang bukti yang ada selanjutnya maka kanit Reskrim beserta penyidik pembantu dan penyelidik melakukan gelar perkara.

Dalam Gelar Perkara biasanya ditentukan siapa pelaku dan Rencana Penyidikan. Namun dalam perkara ini Pihak Kepolisian belum dapat menentukan siapa pelaku pengeroyokan sehingga kegiatan Penyelidikan yang melibatkan seluruh anggota Polsek Namo Rambe dilakukan untuk mencari keterangan maupun alat bukti yang membuat terang tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya. Dalam rangkaian tingkat penyelidikan melibatkan Peran Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang mana Bhabinkamtibmas ini merupakan anggota Polri yang langsung ditempatkan bertugas didesa-desanya sesuai dengan program Pimpinan Polri 1(satu) Bhabinkamtibmas membawahi 1(satu) Desa yang telah dilaksanakan di Wilayah

Hukum Polres Deli Serdang Polda Sumatera Utara.

Dalam Rangkaian Kegiatan Penyelidikan ini Bhabinkamtibmas memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang perkara Pengeroyokan yang terjadi di desa tempat dia bertugas sesuai dengan Fungsi BINMAS (Pembinaan Masyarakat) yang ia emban. Dalam perannya yang langsung melekat didesa dengan Perangkat pemerintahan Desa maka masyarakat dapat langsung menyampaikan perkara-perkara yang ada didesa tersebut. Dalam hal ini para pelaku dan keluarganya telah bertemu dengan korban beserta keluarganya membuat kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan dan menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Desa yang kemudian diteruskan kepada Bhabinkamtibmas yang ada didesa, sehingga Bhabinkamtibmas yang berada didesa melaporkannya kepada Kapolsek selaku Pimpinan Polri di Kecamatan.

Dengan adanya kesepakatan para pihak yang terkait dalam perkara pengeroyokan ini maka Kapolsek meminta Kanit Reskrim untuk menindaklanjutinya. Selanjutnya Kanit Reskrim memerintahkan Penyidik Pembantu untuk menghadirkan para pihak yang terkait dalam tindak pidana pengeroyokan dengan melibatkan Kepala Desa untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perkara pidana pengeroyokan yang telah terjadi.

Dengan diadakannya pertemuan para pihak dan masyarakat yang melibatkan Kepala Desa tersebut maka Kepala Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) memberikan arahan kepada masyarakat tentang Keputusan yang diambil mengenai perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: 1) Mediasi korban

dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. (Herlina dkk, 2004)

Restorative Justice Sebagai Alternatif Penegakan Hukum

Minat Pendekatan *Restorative Justice* sejak konggres 5 tahunan PBB: "*congression crime prevention and the treatment of offenders*". Tahun 1990 dan 1995, LSM dari berbagai negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus berdiskusi tentang *restorative justice*. Tahun 2000 dihasilkan UN, *Basic principle on the use of restorative justice programmes in criminal matters* yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan *restorative justice*. (Yunan Hilmy 2012). Model pendekatan ini adalah upaya penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik diberbagai negara.

Restorative Justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yangnng dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum. Dalam penerapannya, *Restorative Justice* menekankan: 1) Adanya kemauan dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab; 2) Adanya kemauan dari korban untuk memberi maaf; 3) Adanya

kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara; 4) Adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

Pada intinya, pelaksanaan *Restorative Justice* adalah memperbaiki kerusakan sosial yang diakibatkan pelaku, mengembangkan pemulihan bagi korban dan masyarakat, serta mengembalikan pelaku kepada masyarakat. Upaya ini membutuhkan kerja sama semua pihak dan aparat penegak hukum.

Kendala-kendala dalam Penerapan *Restorative justice* yang dilakukan oleh Kepolisian

Pada dasarnya Hukum Nasional adalah suatu sistem.(BPHN 1965). Sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.(Subekti 1979). Sistem ini terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi yang selalu pengaruh-mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi.

Dalam Sistem Hukum Nasional Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum, Khususnya dalam bidang hukum pidana. Kepolisian berperan sebagai penegak hukum terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam hal Penyelidikan dan Penyidikan. Proses peradilan pidana dimulai dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya menuju tahapan penuntutan hal ini dijalankan oleh penuntut umum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memuat wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara,

penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik, setelah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan yang diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan perkara ke pengadilan yang dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan disidang Pengadilan Negeri.(Ridho Mubarak, & Wessy Trisna 2012)

Dalam hal ini perkara dihentikan ditingkat penyidikan atau tidak dilimpahkan kepada Jaksa penuntut umum oleh pihak kepolisian. Kepolisian mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana karena tiga hal yaitu : 1) Perkara yang sedang ditangani bukan merupakan Tindak Pidana; 2) Tidak cukup bukti; 3) Dihentikan demi hukum.

Perkara pengerojukan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa dalam hal ini tidak terdapat alasan untuk menghentikan penyidikan sebagaimana dengan ketiga sebab penghentian penyidikan diatas. Maka sesungguhnya pihak kepolisian tidak dapat menghentikan perkara atau wajib melimpahkan perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian mempunyai kewenangan deskresi berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian yang mengatakan bahwa: 1) Untuk Kepentingan umum, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri; 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-

undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini selaras dengan Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa "Hukum hanya dapat menuntut kehidupan bersama-sama secara umum sebab begitu ia mengatur secara rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara lengkap maka pada waktu itu pula kehidupan akan macet, oleh karena itu sesungguhnya deskresi itu merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri. (Rahardjo, 1983)

Begitu Farouk Muhammad yang mengatakan bahwa "Deskresi merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum. (Muhammad 2005). Dalam era masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat".

Diskresi juga disebut dengan kebijakan, dalam kamus besar bahasa indonesia, (Kamus besar bahasa indonesia hal 115) kata "Kebijakan" dari akar kata "Bijak" sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tata pemerintahan, organisasi dan sebagainya). Kebijakan juga berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Tujuan utama keadilan restoratif adalah mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dia lakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat, reintegrasi pelaku, dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam penerapan keadilan restoratif khususnya diversi, kesepakatan antara

pelaku dan korban menjadi bagian terpenting dari proses. Sebab, kesepakatan itulah yang menjadi modal utama diversi. Jika keluarga korban tak mengampuni pelaku dan tetap ingin pelaku diproses ke pengadilan, keinginan untuk diversi menjadi hilang. Tetapi, sebaliknya, pelaku juga harus secara jujur mengakui kesalahan dan bersedia membayar kerugian kepada korban. "Kalau tidak terjadi kesepakatan maka *restorative justice* gagal".

Teori tujuan pemidanaan pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pemidanaan yaitu: Teori *Retributif* (absolute); Teori *Relatif* (teori tujuan); Teori *Integrative* (gabungan)

Dan dari ketiga teori tersebut sebagaimana dijelaskan dalam bab II teori absolute atau dikenal juga dengan teori pembalasan merupakan teori teretua. Keinginan besar untuk selalu menghukum pelaku kejahatan dengan hukuman penjara bukan saja membuat penjara penuh, tetapi juga menghambat penerapan *Restorative Justice*. Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy yang menjelaskan bahwa: "Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual". (Fatahillah & Syukur, 2012)

Dari uraian di atas pada umumnya kendala-kendala dalam penerapan Prinsip *Restorative Justice* oleh Kepolisian adalah sebagai berikut: 1) Kultur Hukum Yang Belum Mendukung Penerapan Prinsip *Restorative Justice*; 2) Belum Berlakunya

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, saat perkara pengeroyokan terjadi.

Dalam hal ini penelitian dilakukan di polsek namo rambe secara khusus kendala-kendala yang ada antara lain: 1) Kurangnya peran serta masyarakat atau lingkungannya dalam mencari penyelesaian suatu perkara sehingga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian; 2) Perkara yang ditangani oleh pihak kepolisian telah dikirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak Kejaksaan Negeri. 3) Adanya kepentingan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perkara ditingkat penyidikan, misalnya: Kepolisian, Wartawan, LSM atau yang lainnya dimana suatu perkara yang telah diselesaikan oleh masyarakat, mereka seringkali menggunakan upaya-upaya untuk mengungkit permasalahan sehingga pihak Kepolisian (Polsek Namo Rambe) harus mengajukan perkara tersebut kepada penuntut umum. 4) Upaya mereka antara lain memasukkan perkara yang sudah diselesaikan masyarakat kedalam media dengan kata-kata yang dipelintirkan ataupun menanyakan perkara tersebut kepada pimpinan polri (Kapolda, Kapolres) baik melalui media maupun surat ataupun alat komunikasi (Handphone). 5) Suatu perkara yang dilaporkan masyarakat atau laporan pengaduan masyarakat harus diselesaikan secara tuntas oleh pihak Kepolisian atau perkara harus dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

SIMPULAN

Bentuk Penyelesaian dari perkara Pengeroyokan No Pol: LP / 09 / IV / 2014 / SU / Res DS / Sek Nm Rambe. Tanggal 16 April 2014 yang telah diuraikan diatas adalah *Restorative Justice* dimana Pelaku dan korban beserta masyarakat atau pihak yang terkait menyelesaikan sendiri perkara ini secara mandiri. *Restorative Justice* dalam tindak pidana pengeroyokan

sangat menguntungkan kepada kedua belah pihak baik pelaku maupun korban antara lain: a) Korban pengeroyokan dapat pulih dari trauma atau rasa ketakutan akibat dari peristiwa pengeroyokan yang dialaminya. karena dalam prosesnya *Restorative Justice* akan dilaksanakan melalui: 1) Mediasi korban dengan pelanggar; 2) Musyawarah kelompok keluarga; 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku; 3) Hubungan sosial dengan pelaku dan masyarakat akan terjalin baik kembali tanpa ada rasa dendam ataupun benci terhadap pelaku; 4) Pelaku juga akan merasakan hubungan sosial dimasyarakat terutama dengan korban akan terjalin baik dan tidak meninggalkan dendam akibat dari perbuatannya tersebut; 5) Pelaku terhindar dari Sistem Peradilan Pidana dengan sanksi penjara.

Kendala-kendala dalam proses *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pengeroyokan disini berupa: 1) Belum Berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak saat perkara ini terjadi; 2) Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* ini tidak melalui putusan pengadilan sehingga banyak pendapat mencap penyelesaian ini illegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *"Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan"*, Kencana, Jakarta.
- Arief, B.N. (1996). *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996.
- Arifin, S. (2012). *"Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum"*, Medan Area University Press, Medan.
- Arifin, S. Siddik, M. Rizki, F.K. (2014). *"Pengantar falsafah hukum"*, Citapusaka Media, Medan
- Bawengan, G. (1977). *"Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi"*, Pradya Paramita, Jakarta.

- Bisri, I. (2011). *"Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia"*, Rajawali Pers. Jakarta.
- BPHN, *Pola pikir dan kerangka hukum nasional serta rencana pembangunan hukum jangka panjang*, (Jakarta, BPHN 1995/1996).
- Ediwarman, (2014), *"Penegakan Hukum Pidana dalam perspektif kriminologi "*, Genta Publishing, Medan
- Fatahillah, D.S.D. Syukur, A. (2012). *"Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia"*. Indie Pre Publishing, Depok.
- Hamzah, A. (2008), *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Hanafiah, A. (2000). *"Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan"*, Kalem diklat, Jakarta
- Harahap, M.Y. (2002). *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP-Penyidikan dan Penuntutan"*, E disi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, A. dkk, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilmy, Y. (2012). *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*" (makalah disampaikan dalam Rakernis Fungsi Reserse Narkoba Jajaran Polda Kalsel, di Banjarmasin, 11 April 2012).
- <http://2dy.wordpress.com/defenisi-remaja/2008/12/10>. Ibid Montesquieu, *Espirit de lois*.
- Ilyas, A. (2012), *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. (1986). *"Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter, E.Y. et.al., (2012). *"Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya"*, Stora Grafika, Jakarta.
- Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- Mubarak, R. & Trisna, W. (2012). *"Buku ajar hukum kejahatan anak"*, Medan Area University Press, Medan.
- Muhammad, F. (2005), *"Perencanaan pembangunan hukum nasional (PPHN), kelompok kerja bidang hukum dan polkam"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak azasi Manusia,
- Poerwadarminta, W.J.S. (1993), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, S. (1983), *masalah penegakan hukum, suatu tinjauan sosiologis hukum*, Sinar baru, Bandung
- Salam, M.F. (2005), *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Schaffmeister, D. Keijer, N. & Sutorius, E.P.H. (1995). Terjemahan J.E Sahetapy, *"Hukum Pidana"*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soekito, S.W.W. (1983). *"Anak dan Wanita Dalam Hukum"*. Jakarta: LP3S.
- Subekti, (1997) *"beberapa pemikiran mengenai sistem nasional yang akan datang "* (Makalah Seminar Hukum Nasional IV, 1979
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang, *Kitab undang-undang Hukum Pidana*
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang, *"Sistem Peradilan Pidana anak"*.
- Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang, *"Sistem Peradilan Pidana anak"*.
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang, *"Kepolisian Negara Republik Indonesia"*.
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang *"Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana"*.
- Waluyadi, (1999). *"Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana"*. Mandar Maju, Bandung.
- Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Namo Rambe IPTU Semen Sembiring.
- Wawancara dengan Kepala Desa Suka Mulia Hulu An Terkelin Sembiring.
- Wessy, W. (2014). *Politik Hukum Pidana*, Universitas medan area, 26 Nopember 2014
- Zulfa, E.A. (2000). *"Keadilan Restorative"*, Badan Penerbitan F.H. Universitas Indonesia, Jakarta.